



SOSIALISASI PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA DI SMK NEGERI 5 KABUPATEN BULUKUMBA

Zaenal Akhmad¹, Usman Thamrin², Rudy Santosa³
^{1,2,3}Universitas Pejuang RI Makassar

Article Information

Article history:

Received April 01,
2023

Approved April 05,
2023

Keywords:

Pendidikan
Politik,
Pemilih Pemula

ABSTRAK

PKM ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan politik kepada para pemilih pemula agar bisa memahami pentingnya menggunakan hak suara dalam pemilihan umum tahun 2024. Adapun peserta sosialisasi adalah para siswa siswi kelas XII SMK Neg. 5 Kabupaten Bulukumba. Pendidikan politik bagi pemilih pemula sangatlah penting, karena baru pertama kali ini mengikuti pemilihan umum. Hal ini diarahkan untuk mempertajam daya kritis dan mendorong mereka untuk berpikir matang dalam menjatuhkan pilihannya. Sosialisasi pemilu dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan politik untuk mewujudkan partisipasi politik yang bermutu dan berkualitas. Sosialisasi ini juga diharapkan mampu untuk mengembangkan potensi diri agar menjadi generasi yang berkualitas dalam memiliki idealisme. Adapun metode penyampaian materi yakni dengan memaparkan langsung kepada siswa/siswi peserta PKM, melakukan diskusi dan tanya jawab. Pelaksanaan kegiatan PKM di SMK Neg. 5 Kabupaten Bulukumba, disimpulkan bahwa adanya peningkatan pemahaman dari siswa/siswi tentang materi-materi yang diberikan yakni konsep pemilihan umum, elemen pemilu, prinsip penyelenggara pemilihan umum dan bagaimana peran pemilih pemula dalam menghadapi isu-isu dan tantangan pemilihan umum.

ABSTRACT

This PKM aims to provide understanding and political knowledge to first-time voters so they can understand the importance of using their voting rights in the 2024 general election. The socialization participants are class XII students at SMK Neg. 5 Bulukumba District. Political education for novice voters is very important, because this is the first time they are taking part in a general election. This is directed at sharpening their critical power and encouraging

them to think carefully in making their choices. Election socialization can be used as a means of political education to realize quality and quality political participation. This socialization is also expected to be able to develop self-potential in order to become a generation of quality in having idealism. The method of delivering the material is by explaining directly to the students participating in the PKM, conducting discussions and asking questions. Implementation of PKM activities at SMK Neg. 5 Bulukumba District, it was concluded that there was an increase in students' understanding of the materials provided, namely the concept of general elections, elements of elections, the principles of general election organizers and what is the role of first-time voters in dealing with general election issues and challenges.

© 2023 EJOIN

*Corresponding author email: zaenalakhmad64@gmail.com

PENDAHULUAN

Secara teori, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan yang diatur dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat (Scholte, 2014). Indonesia merupakan negara dengan sistem demokrasi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat, hal tersebut direpresentasikan oleh wakil-wakil rakyat yang ada di parlemen (Maaratong, 2020). Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan, yang kemudian menjamin pemerintahan untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusannya. Pemilihan Umum merupakan ciri mendasar suatu negara demokrasi.

Pemilihan umum merupakan pesta demokrasi warga negara untuk mewujudkan keinginan politik rakyat dalam memilih calon pemimpin yang pantas menduduki jabatan atas amanat yang diberikan (Hatta Abdi Muhammad, Nopyandri, Ujang Babas, 2020). Demokrasi juga menggariskan bahwa pemilu adalah kesempatan bagi partai oposisi dan rakyat untuk menjalankan mekanisme *check and balances* terhadap partai yang berkuasa (Valentina, 2009).

Penyelenggara pemilu menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggara Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat (Sa'ban et al., 2021).

Proses pemilu merupakan proses politik untuk memilih wakil rakyat yang akan menentukan arah pembangunan bagi negara selama 5 tahun ke depan. Untuk itu peserta yang merupakan pemilih pemula dan belum pernah melakukan proses pemilu diharapkan bisa mempergunakan hak pilihnya dengan baik dan menghasilkan wakil rakyat yang terbaik untuk menentukan arah pembangunan bangsa dalam mencapai cita cita negara, yaitu kesejahteraan rakyat.

Pemilihan secara langsung terhadap calon pemimpin daerah oleh masyarakat membawa angin perubahan dengan mendekatkan antara pemilih dengan calon pemimpin daerah, proses dialektika diantaranya dapat berjalan dengan lebih intens, memotong

panjangnya jalur administrasi politik yang panjang melalui sistem keterwakilan lembaga legislatif dan dalam artian yang lebih sempit mengembalikan hak-hak dasar masyarakat secara luas untuk berpartisipasi pada proses politik dalam lingkup politik lokal secara demokratis (Suhartono, 2019).

Indonesia merupakan negara demokrasi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat. Sebagai negara demokrasi, partai politik merupakan hal penting karena menjadi representatif rakyat melalui wakil-wakilnya di dalam pemerintahan. Pemilihan Kepala Daerah merupakan wujud dari pembentukan demokratisasi di daerah. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di pilih dalam satu pasang calon yang dilaksanakan secara demokratis, secara langsung dipilih oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Sa'ban et al., 2020).

Era pemilihan serentak dan langsung ini mulai diinisiasi sejak tahun 2004 meskipun dilakukan secara bertahap dan dilaksanakan di beberapa daerah. Hal ini menjadi penanda semakin berkembangnya demokrasi di negeri ini untuk mewujudkan pemilihan yang bersifat langsung umum, bebas dan rahasia. Beberapa jenis pemilihan umum seperti, pemilihan legislatif (DPR RI, DPD, DPRD) serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Kepala Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menandai proses pemilihan langsung dan serentak di negeri ini. Pesta demokrasi yang sebelumnya berlangsung pada setiap lima tahun sekali, namun sejak berlangsungnya pemilihan langsung dan serentak di berbagai di wilayah, masyarakat kemudian dihadapkan dengan proses pemilihan yang berlangsung hampir setiap tahun di berbagai daerah tergantung pada berakhirnya masa jabatan lima tahun sebagai kepala daerah maupun keanggotaan di lembaga legislatif.

Semakin terbukanya secara luas partisipasi masyarakat dalam pemilihan calon kepala daerah pada saat sekarang ini, menarik untuk melihat bahwa hal tersebut ternyata tidak serta merta disertai meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam memilih pemimpin (Suhartono, 2019). Jual beli suara dalam ajang Pemilihan Umum (Pemilu), atau Pemilihan Umum Langsung Kepala Daerah (Pemilukada), yang lazim dikenal dengan istilah „politik uang“ atau politik transaksional, merupakan hambatan yang tidak terlihat, maupun terlihat secara kasat mata, yang dilakukan kandidat, tim sukses resmi, maupun tim sukses bayangan, telah menggiring Indonesia dalam praktik demokrasi yang secara etis tidak bermartabat (Hamson, 2021).

Problematika pemilu di Indonesia, dari periode pemilu ke pemilu berikutnya, masih belum memperlihatkan gejala berkurangnya perilaku politik uang, dalam berbagai kajian dan penelitian ditemukan kesimpulan politik uang adalah gejala yang telah berlangsung dari pemilu ke pemilu dan seringkali tidak tersentuh oleh penegakan hukum (Hamson, 2021). Kesadaran akan resiko rusaknya substansi demokrasi, disuarakan dengan berbagai cara, baik komunitas akademik, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun penyelenggara pemilu, yang juga masih secara kasuistis terdampak politik uang, dimulai dari seleksi calon komisioner, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), telah dengan kuat diintervensi para politisi baik secara kelembagaan maupun personal, untuk mengatur hasil seleksi calon, sebelum diumumkan (Chrisdanty & Wahyulina, 2014).

Mengutip pendapat Samuel Huntington demokrasi ada jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa dapat memberikan suara (Huntington, 1991). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan (Alfiantoro, 2018),

(Muhtadi, 2013), terkait politik uang diperoleh beberapa faktor yang menyebabkan politik uang di pemilu, yakni Faktor ekonomi, faktor mentalitas, faktor penegakan hukum, faktor interaksi peran sosial, faktor pemahaman nilai agama, faktor pemahaman berdemokrasi. Masyarakat Indonesia belum memiliki kesadaran dalam berdemokrasi dan bernegara, hal itu dapat dilihat pada uraian masih efektifnya politik uang dalam pemilu berdasarkan penelitian Susanto I. (2018), Dendy Lukmajati (2015), Holish A. Rohmat R. Syarifudin (2018).

Dalam suatu pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih (Arniti, 2020). Upaya meningkatkan partisipasi, pemahaman dan kesadaran berpolitik dapat dilakukan berbagai pihak, baik dari penyelenggara pemilu, peserta politik, maupun kalangan akademisi terutama dari perguruan tinggi dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Hatta Abdi Muhammad¹, Nopyandri², Ujang Babas³, 2020). Salah satu cara yang dapat ditempuh dalam meningkatkan partisipasi, pemahaman dan kesadaran berpolitik melalui pendidikan politik, yang menjadi isu penting untuk menumbuhkan kesadaran politik masyarakat.

Pemilih muda pada Pemilu adalah generasi baru pemilih yang memiliki sifat dan karakter, latar belakang, pengalaman dan tantangan yang berbeda dengan para pemilih di generasi sebelumnya (Nur Wardhani, 2018). Suara pemilih pemula ini perlu diarahkan agar tidak salah dalam menyalurkan aspirasinya sehinggapemilihan umum berjalan sesuai dengan asas demokrasi. Maka dari itu, Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pejuang RI Makassar mendukung adanya sosialisasi pemilihan umum kepada pemilih pemula.

Tujuan diadakan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan politik kepada para pemilih pemula agar bisa memahami pentingnya menggunakan hak suara dalam pemilihan umum tahun 2024. Adapun peserta sosialisasi adalah para siswa siswi kelas XII SMK Neg. 5 Kabupaten Bulukumba. Sosialisasi pemilu dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan politik untuk mewujudkan partisipasi politik masyarakat yang bermutu dan berkualitas. Sosialisasi ini juga diharapkan mampu untuk mengembangkan potensi diri agar menjadi generasi yang berkualitas dalam memiliki idealisme.

Secara teknis, pendidikan politik memberikan pemahaman tentang etika dan budaya politik sebagaimana mencerminkan etika budaya yang baik dan positif dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan keluarga dan sekolah. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan metode penyampaian materi dan diisi dengan diskusi.

Pendidikan politik sarannya adalah membangun masyarakat yang cerdas dalam berpolitik dengan indikator mengetahui dengan baik hak dan kewajiban dalam menyalurkan aspirasi politik, partisipasi, bertanggung jawab serta berpolaborasi dalam kemajuan masyarakat. Pendidikan politik bagi pemilih pemula sangatlah penting, karena baru pertama kali ini mengikuti pemilu. Hal ini diarahkan untuk mempertajam daya kritis dan mendorong mereka untuk berpikir matang dalam menjatuhkan pilihannya.

LANDASAN TEORI

A. Pemilihan Umum

Cara kerja lembaga politik yang di sebut sebagai pemilihan umum lebih dari lembaga- lembaga lain berhubungan paling dekat dengan perang dan arena itu yang paling sering pula mengambil alih konsep dan metoda perang, sebegitu rupa, sehingga politik adalah perang dan hingar bingar perang jadi satu dengan hingar bingar politik. Karena itu berbagai unsur perang, bahasa perang menjadi bahasa politik pemilihan umum. Konsep-

konsep seperti “strategi dan taktik”, dan teknik-teknik mengumbar emosi politik boleh dikatakan diambil mentah-mentah menjadi kosa kata pemilihan umum dan dicoba dipakai seefektif mungkin.. Dekatnya konsep pemilihan umum dan perang membuat pemilihan umum menjadi lembaga yang senantiasa membutuhkan bangunan pengetahuan, *the body of knowledge*, seperti yang dimiliki angkatan perang, tentang sumber daya politik yang harus dipilah, diolah, dan diarahkan, secara rasional untuk memetik suatu tujuan yang pasti yaitu memenangkan pemilihan umum. Menurut Daniel Dhakidae (2004 : 15) bahwa konsep menang-kalah, korban yang jatuh, ongkos yang dibayar dan lain-lain adalah terutama konsep perang yang kelak diambil alih menjadi konsep politik. Salah satu bangunan pengetahuan yang dimaksudkan di sini adalah pengetahuan akan makna dan konsep dari demokrasi. Demokrasi pada mulanya merupakan suatu gagasan tentang pola kehidupan yang muncul sebagai reaksi terhadap kenyataan social politik yang tidak manusiawi di tengah-tengah masyarakat. Reaksi tersebut tentu datangnya dari orang-orang yang berpikiran idealis dan bijaksana. Mereka terusik dan tergugah melihat adanya pengekangan dan pemerkosaan hak-hak dasar manusia.

Ada tiga nilai ideal yang mendukung demokrasi sebagai suatu gagasan kehidupan yaitu kemerdekaan, persamaan, dan keadilan. Sejalan dengan makin menduniannya demokrasi, pemikiran tentang demokrasi pun semakin berkembang. Tapi pada umumnya pemikiran itu berintikan tentang kekuasaan dalam Negara. Dalam Negara demokrasi, rakyatlah yang memiliki dan mengendalikan kekuasaan dan kekuasaan itu dijalankan demi kepentingan rakyat. Dimana Abraham Lincoln sendiri pernah mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tidak ada Demokrasi tanpa diikuti pemilu, dan pemilu merupakan sebuah wujud nyata dari Demokrasi itu sendiri.

1. Arti Pemilihan Umum

Secara teoritis, pemilihan umum merupakan salah satu ciri dari sebuah sistem politik demokratis, dalam arti lembaga-lembaga pemilihan umum dan badan legislatif yang dihasilkannya merupakan satu-satunya penghubung yang sah antara rakyat dan pemerintah dalam suatu masyarakat modern. Sebagai prasyarat utama bagi rakyat untuk mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan mereka, keberadaan pemilu beserta lembaga-lembaga terkaitnya merupakan sebuah keniscayaan, bahkan dari hasil pemilu-pemilu selanjutnya ditentukan program-program pemerintah.

Jelas bahwa pemilu adalah institusi pokok pemerintahan yang demokratis, karena dalam kamus demokrasi, wewenang pemerintah hanya diperoleh atas persetujuan dari warga Negara yang memilihnya. Keberadaan pemilu, sebuah keharusan utama bagi warga Negara untuk menyampaikan dan mendesakkan semua kepentingannya, berarti pemilu bagi pemerintah adalah sumber utama legitimasi untuk menjalankan sebuah pemerintahan yang jujur dan adil tanpa rekayasa apapun.

Lebih tegas lagi, bahwa pemilu adalah merupakan sebuah taruhan yang cukup konkrit bagi proses pengujian sebuah kedaulatan rakyat, yang dimana terlepas dari system yang digunakan. Lewat pemilu, warga Negara berkesempatan mewujudkan demokrasi.

2. Pilihan Sistem Pemilihan Umum

Ada beberapa standar yang harus menjadi acuan agar pemilu benar-benar menjadi parameter demokrasi.

Pertama, pelaksanaan pemilihan umum harus memberikan peluang sepenuhnya kepada semua partai politik untuk bersaing secara bebas, jujur, dan adil.

Kedua, pelaksanaan pemilu betul-betul dimaksudkan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang berkualitas, memiliki integritas moral dan yang paling penting wakil-wakil tersebut betul-betul mencerminkan kehendak rakyat.

Ketiga, pelaksanaan pemilu harus melibatkan semua warga Negara tanpa diskriminasi sedikitpun, sehingga rakyat benar-benar mempunyai kepercayaan bahwa dirinya adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat.

Keempat, pemilu dilaksanakan dengan perangkat peraturan yang mendukung asas kebebasan dan kejujuran dimana harus memenuhi tiga persyaratan yakni ; lengkap unsure substansinya – berarti adanya jaminan kepentingan golongan, jaminan hak asasi dan jaminan demokrasi. Memberikan persamaan kesempatan, dan tidak boleh ada tafsir tentang peraturan secara sepihak.

Kelima, pelaksanaan pemilu hendaklah mempertimbangkan instrument dan penyelenggaranya, karena akan sangat mungkin kepentingan–kepentingan penyelenggara (lembaga) akan mengganggu kemurnian pemilu.

Keenam, pada persoalan yang lebih filosofis, pemilu hendaknya lebih ditekankan pada manifestasi hak masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

Namun idealisasi pemilu diatas sulit tercapai tanpa dibarengi dengan system dan pelaksanaan pemilihan yang memadai. Sebenarnya system pemilu tidak menjadi patokan utama dalam sebuah Negara, karena system pemilu (proporsional maupun distrik) kompatibilitasnya sangat dipengaruhi oleh kondisi politik dan komposisi penduduk di masing-masing daerah. Hal yang paling krusial adalah pelaksana atau penyelenggara pemilihan itu, karena dari pelaksanalah banyak terjadi distorsi-distorsi yang akhirnya mengganggu kemurnian demokrasi.

Sistem pemilu selama ini ada dua, sistem proporsional (multi member constituency) dan sistem distrik (single member constituency). Sistem proporsional dipandang lebih toleran dibanding sistem distrik. Sistem ini tidak meniadakan suara dan kekuatan partai yang kalah. Artinya partai yang mendapat suara lebih kecil masih bisa mendapatkan kursi di parlemen, tentunya disesuaikan dengan jumlah suara yang diperoleh. Dengan kata lain hampir tidak ada suara yang terbuang.

Namun sistem proporsional murni memiliki segenap kelemahan. Misalnya penentuan calon anggota parlemen diputuskan oleh pimpinan partai. Pemilih tidak memiliki kewenangan untuk menentukan calon anggota legislative. Dengan demikian, sistem ini lebih lemah aspek representasinya di banding sistem distrik.

Sistem distrik sebetulnya lebih membuat nuansa persaingan partai politik lebih tinggi, karena sistem ini mengharuskan seorang calon anggota parlemen betul-betul berkualitas dan mewakili daerah pemilihannya. Sistem distrik lebih memberi peluang munculnya oposisi di parlemen. Dari sedikit bahasan tersebut, tampaknya sulit menentukan secara ekstrim satu sistem dan menolak sistem lain. Yang paling mungkin adalah upaya penggabungan kedua sistem tersebut dimana diharapkan dapat memberikan jaminan kedaulatan rakyat dan keterwakilan rakyat dalam keanggotannya. Secara teoritis, sistem ini memiliki kelebihan :

Pertama, anggota legislatif yang terpilih benar-benar akan memperjuangkan kepentingan rakyat, terutama didaerah pemilihannya (Distrik) karena wakil yang terpilih merupakan kehendak sepenuhnya rakyat.

Kedua, sistem ini akan lebih mendekatkan anggota dewan dengan masyarakat.

Ketiga, dalam hubungannya antara anggota dewan dengan partai politik, pimpinan partai politik tidak lagi dalam posisi dominant dalam menentukan calonnya

Keempat, karena kepentingan partai politik tidak lagi dominan, maka kadar kepentingan partai politik tidak lagi diutamakan.

Sistem gabungan tersebut adalah kompromi dari bentuk ekstrim sistem distrik dan proporsional. Namun sistem distrik lebih merupakan pilihan utama. Dalam sistem distrik

murni, partai politik yang kalah (perolehan suaranya lebih kecil) tidak mendapatkan perwakilan dalam lembaga legislatif. Akibatnya perolehan suara dari partai politik tersebut sia-sia. Untuk mengatasi terbuangnya

suara maka sistem distrik harus dilengkapi dengan sistem proporsional. Namun dalam kondisi dimana komposisi penduduk antar daerah satu dengan lainnya berimbang dan pengetahuan serta kesadaran politik masyarakat lebih baik, maka sistem pemilu distrik murni hendaknya menjadi pertimbangan utama.

3. Fungsi Pemilihan Umum

Pemilu mempunyai fungsi yang tak dapat dipisahkan satu sama lain yaitu:

Pertama, sebagai sarana legitimasi politik. Melalui pemilu keabsahan pemerintah yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkannya. Benyamin Ginsberg (Riswandha, 1992:46) mengatakan bahwa fungsi legitimasi politik merupakan konsekuensi logis yang dimiliki oleh pemilu, yaitu untuk mengubah suatu keterlibatan politik massa dari yang bersifat sporadic dan dapat membahayakan menjadi suatu sumber utama bagi otoritas dan kekuatan politik nasional.

Kedua, sebagai fungsi perwakilan politik. Pemilu dalam kaitan ini merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakil yang dapat dipercaya yang akan duduk dalam pemerintahan maupun lembaga legislatif.

Ketiga, pemilu sebagai mekanisme bagi pergantian atau sirkulasi elite penguasa. Keterkaitan pemilu dengan sirkulasi elite didasarkan pada asumsi bahwa elite berasal dari dan bertugas mewakili rakyat luas. Secara teoritis, hubungan pemilu dengan sirkulasi elite dapat dijelaskan dengan melihat proses mobilitas kaum elite atau non elite yang menggunakan jalur institusi politik, pemerintahan dan lembaga masyarakat seperti DPR, Partai politik, dan Organisasi Kemasyarakatan untuk menjadi anggota elite tingkat nasional yakni sebagai anggota kabinet dan jabatan yang setara. Dalam kaitan ini pemilu merupakan sarana dan jalur langsung untuk mencapai posisi elite penguasa. Dengan begitu maka pemilu diharapkan bisa berlangsung pergantian atau sirkulasi elite penguasa secara kompetitif dan demokratis.

Keempat, sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka, massal, dan diharapkan dapat mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.

B. Sosialisasi Politik

Terminologi sosialisasi politik dalam literatur ilmu politik sering digunakan dalam beberapa pengertian, sekurang-kurangnya terdapat beberapa pengertian (bahasa asing) yang *terkandung* dalam istilah sosialisasi politik yakni, *political socialization*, *political education*, *political forming*, *citizenship training*, dan *politische building*. Namun istilah tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dipakai dua istilah yaitu : sosialisasi politik dan pendidikan politik, namun dalam penulisan skripsi ini, dianggap pengertian keduanya sama, karena mengandung suatu proses dimana kumpulan nilai-nilai, sikap politik ditransmisikan (ditularkan) dari individu atau masyarakat kepada generasi berikutnya agar nantinya mampu berpartisipasi dalam sistem politik.

Dari berbagai literatur asing yang ada dari berbagai term konsep para ahli sosialisasi politik, seperti *Gabriel A. Almond* dalam *Political socialization and culture*, *Michael Bush* dan *Philip Althoff* dalam *An introduction to political sociology*, *Dennis kavanag* dalam *Political culture*, *David E Apter* dalam *The political of* dan lain lain. Dari kesemua konsep para ahli tersebut dapat disistematiskan ke dalam kerangka sistem politik dengan berlandaskan kondisi dan keadaan sistem politik yang berlaku dalam suatu bangsa.

Sosiologi politik inhere (melekat) dengan nilai-nilai budaya politik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga sosialisasi politik dapat mengkespresikan dengan pembentukan persepsi, sikap dan tingkah laku.

Sosialisasi politik adalah suatu proses belajar dimana setiap individu memperoleh orientasi berupa keyakinan perasaan dan komponen nilai-nilai terhadap pemerintah dan kehidupan politik.

Selanjutnya di bawah ini akan diuraikan tentang pengertian sosiologi politik dari beberapa ahli pertama-tama penulis akan memaparkan pemikiran Almond yang berkaitan dengan studi ini.

Menurut Almond, proses belajar bermasyarakat untuk mewariskan nilai-nilai budaya politik yang dianut oleh suatu masyarakat dari suatu generasi kepada generasi berikutnya disebut sebagai proses sosialisasi politik (Mas'ood mochtar dan Andrews Colin Mac, 1986 : 74). Penulisan ini melibatkan dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mengenal dan menyerap nilai-nilai, norma-norma dan keyakinan serta sikap politik yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, konsekuensinya proses Pewarisan itu akan menghasilkan pengenalan dan penghayatan politik.

Lebih jauh lagi konsekuensi politik berfungsi memperkenalkan seseorang kepada sistem politik dan menentukan tanggapan serta reaksi-reaksi terhadap gejala-gejala politik dari proses inilah seseorang diperkenalkan pada peran yang diharapkan untuk meyakinkan kelak.

Selanjutnya Almond menyebutkan bahwa Sosialisasi politik adalah bagian dari proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai-nilai politik yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politik.

Dalam proses sosialisasi politik transmisi nilai-nilai kebudayaan menyebabkan seseorang menjadi tahu tentang bagaimana seharusnya ia bersikap dari bertingkah laku sehingga mampu berpartisipasi dalam sistem politik. Disamping itu pula sosialisasi politik merupakan sarana bagi suatu generasi untuk mewariskan patokan dari keyakinan politik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Proses ini disebut transmisi kebudayaan.

Sosialisasi politik yang berwujud transmisi kebudayaan dari pengajaran memiliki dua sifat langsung maupun tak langsung. Sosialisasi bersifat langsung jikalau melibatkan komunikasi informasi, nilai-nilai atau perasaan-perasaan mengenai politik secara eksplisit. Hal ini dapat dilihat dari pengajaran nilai-nilai kepada masyarakat, seperti halnya usaha-usaha partai komunis untuk menciptakan "orang soviet". Sosialisasi politik tak langsung adalah berlangsung pada masa kanak-kanak hingga dewasa dengan pengaruh yang terekam selama perkembangan si anak dapat mempengaruhi pandangan politik mereka saat sudah dewasa.

Apabila proses transmisi kebudayaan diperjelas dalam pelaksanaannya, maka pertanyaan selanjutnya sejauh mana nilai dari keyakinan politik yang diwariskan melalui proses transmisi kebudayaan bisa diserap oleh individu, adalah sejauh mana ia dapat menampilkan persepsinya yang konsisten dan saling mempertautkan pandangan-pandangan politiknya.

Apter (1985 : 54) mengatakan bahwa Pengenalan dan penamaan politik merupakan konsekuensi dari susunan motivasi sekitar afesialisasi persepsi nilai-nilai yang cocok dengan peran mereka. Hal itulah yang menggiring seseorang dalam kebudayaan politik dan menyuntikkan tanggung jawab sehingga mereka bisa mengadakan penilaian dan berkenaan tampil secara konsisten, maka mereka bisa masuk dalam bentuk bisa diakui.

Sosialisasi politik adalah sebuah proses belajar dimana setiap individu memperoleh orientasi berupa keyakinan perasaan dan komponen nilai-nilai terhadap pemerintah dan

kehidupan politik. Dari sudut pandang masyarakat, sosialisasi politik adalah cara menjawab kebudayaan politik.

Selanjutnya Almond, berpendapat bahwa Sosialisasi politik membentuk dan mewariskan kebudayaan politik suatu bangsa. Sosialisasi politik juga bisa memelihara kebudayaan politik suatu bangsa dalam bentuk Pewarisan kebudayaan itu oleh suatu generasi kepada generasi berikutnya. Sosialisasi politik juga bisa merubah kebudayaan politik, yaitu bila sosialisasi itu menyebabkan penduduk atau sebagian penduduk, melihat atau mengalami kehidupan politik yang dijalankan dengan cara lain. Pada waktu terjadi perubahan besar atau peristiwa-peristiwa luar biasa, misalnya terbentuknya negara baru, sosialisasi politik yang baru sama sekali memelihara, merubah dan menciptakan kebudayaan politik adalah macam-macam fungsi yang dijalankan oleh sosialisasi politik.

Kenyataan bahwa sosialisasi politik menampakkan segi lain dengan adanya kebutuhan individu untuk meragamkan persepsinya yang konsisten dan saling berkaitan itu sampai pada derajat tertentu. Derajat seseorang tidak dapat tersebar untuk menentukan kekonsistensinya. Dengan kata lain, sosialisasi politik tidak dapat menjamin sikap dari tingkah laku individu atau kelompok sesuai dengan kehendak sistem politiknya.

Hal tersebut disebabkan oleh pengaruh dari pengalaman yang didapat akan mempengaruhi sikap-sikap politik individu atau kelompok. Dan bila ini menjadi kenyataan, maka sikap dari tingkah laku individu atau kelompok akan tercermin dalam proses-proses politiknya. Dengan demikian sosialisasi politik menimbulkan pengingkaran (ketidak konsistenan) sekaligus dapat memberikan secara drastis (resosialisasi) kepada individu atau masyarakat dalam kehidupan politik.

Oleh karena itu perlu adanya proses sosialisasi politik yang diarahkan sesuai dengan kehendak sistem politiknya, sosialisasi politik yang diarahkan ini oleh sistem disebut sehingga pendidikan politik. Selanjutnya ia mengatakan bahwa Sosialisasi politik atau pendidikan politik dalam arti longgar adalah bagian langsung dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Disenangi atau tidak hal itu dialami oleh anggota masyarakat, baik penguasa atau orang dewasa. Suasannya menjadi berbeda kalau ada usaha untuk mengubah sosialisasi itu, umpamanya dengan mernasukkan nilai-nilai politik baru yang dianggap ideal. Usaha yang sadar ini jelas bertujuan mengarahkan proses sosialisasi masyarakat ke jurusan tertentu, misalnya ke arah perkembangan sikap dari tingkah laku politik yang demokratis." (Alfian, 1986 : 233).

Buat bangsa Indonesia secara ideal sudah disepakati untuk memakai sistem demokrasi Pancasila yang secara teknis dari pelaksanaannya sudah dilukiskan ke dalam UUD 1945 dan secara ideal perlu diwujudkan kedua tingkah laku sehari-hari. Hal ini tentunya memerlukan suatu penghayatan yang juga membeukan proses sosialisasi politik atau pendidikan politik.

Klimaksnya dari beberapa pengertian sosialisasi di atas akhimya Marry Grisses Dan Robert W. Kweit (Alfian, 1986 : 92) menyimpulkan bahwa, Sosialisasi politik adalah suatu proses melalui mana individu belajar tentang politik.

Berkenaan dengan sosialisasi politik, penulis mengetengahkan kesimpulan bahwa sosialisasi politik adalah suatu proses mengenal, memahami, menghayati nilai-nilai politik yang dianut oleh suatu masyarakat atau negara tertentu untuk dijadikan nilai pribadi dan dilaksanakan dalam praktek hidup politik. Nilai-nilai politik tersebut ditransmisikan dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui agen atau sarana sosialisasi politik seperti halnya partai politik, sosialisasi politik ikut pula mendewasakan anggota masyarakat secara politik. Hal yang terpenting adalah jika sosialisasi politik dijalankan berdasarkan inisiatif individu atau golongan, dinamakan sosialisasi secara subyektif. Sebaliknya secara objektif berarti masyarakat atau negara melalui lembaga formal yang ada berusaha

mendidik atau membentuk sikap hidup atau pola tingkah laku individu atau masyarakat dengan doktrin atau kebenaran yang berlaku dalam masyarakat atau negara tertentu.

C. Pengertian Pendidikan Politik

Definisi pendidikan politik sangat beragam. Tidak hanya itu, pengertian antara pendidikan politik dan sosialisasi politik (*political socialization*) juga kerap menimbulkan multitafsir. Namun perbedaan itu tidaklah mengaburkan makna atas pentingnya pendidikan politik tersebut. Ada banyak pendapat ahli tentang pendidikan politik yang mencoba meletakkan konsep dasar pendidikan politik. Menurut Kantaprawira (2004) pendidikan politik sebagai cara untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Tidak hanya menekankan pada aspek kognitif, menurut Kartono (1996) dengan adanya pendidikan politik maka bukan hanya pemahaman peristiwa-peristiwa politik dan konflik yang diutamakan, akan tetapi orang justru menekankan aktivitas politik secara sadar dan benar dengan azas-azas demokrasi sejati.

Pendidikan politik juga terikat dengan lingkungan sekitar individu berada. Maka K. Atkin & Gantz (1978) mendefinisikan bahwa: *“Political socialization is a developmental process by which children and adolescents acquire cognitions, attitudes, and behaviors relating to their political environment.* Secara ringkas dan lebih tegas, Birzea (2000) mendefinisikan pendidikan politik sebagai proses dimana masyarakat dapat/mampu baik secara individu dan atau kelompok menganalisa dan mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik.

Dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik mendefinisikan bahwa “Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Pasal 1 ayat [a4]).”

Dari beberapa pendapat diatas sekalipun beragam namun dapat ditarik garis lurus persamaan pandangan bahwa tujuan dari pendidikan politik tetap pada peningkatan kualitas masyarakat bahwa secara afektif, kognitif dan psikomotor dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana ditegaskan oleh Dekker and Arie in 't Veld (2014): *“Political socialization is the whole of those processes and structures through which people develop particular political behaviors and acquire particular political orientations, including political behavioral intentions, emotions, values, attitudes, opinions, beliefs or perceptions, and knowledge.”*

Di sinilah esensi penting pendidikan politik. Pendidikan politik berfungsi sebagai sesuatu hal yang esensial dan terus-menerus dilakukan dalam masyarakat. Pendidikan politik sama pentingnya dengan eksistensi politik itu sendiri. Politik tanpa pendidikan politik adalah kebutaan sedangkan pendidikan politik tanpa politik adalah kehampaan. Sederhananya, efektivitas berjalannya sistem politik ditentukan oleh pendidikan politik (Handoyo& Lestari,2017).

D. Bentuk Pendidikan Politik

Pendidikan politik beragam dalam implementasinya. Pendidikan politik tergantung kepada siapa yang menjadi pelaksananya atau subjeknya. Bentuk pendidikan politik menurut Kantaprawira (2004) dapat diselenggarakan antara lain: Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain bentuk publikasi masa yang biasa membentuk pendapat umum; (b) Siaran radio dan televisi serta film (audio visual media); (c) Lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal (sekolah) ataupun informal.

Pendidikan politik tentunya tidak akan terlaksana tanpa adanya penyelenggaraan yang dilakukan secara konkret di lapangan atau di tengah-tengah masyarakat. Kuntowijoyo mengemukakan tentang bentuk pendidikan politik, yakni: Pendidikan politik formal yakni pendidikan politik yang diselenggarakan melalui indoktrinasi; (b)

Pendidikan politik yang dilakukan secara non-formal, seperti melalui pertukaran pendidikan melalui mimbar bebas. Pendidikan politik yang baik adalah pendidikan politik yang memobilisasi simbol-simbol nasional, seperti sejarah, seni sastra, dan bahasa (1994).

Pendidikan politik jalur formal adalah pendidikan lewat struktur resmi yakni jenjang kependidikan jalur sekolah. Sedangkan pendidikan politik non-formal bisa dikatakan adalah pendidikan diluar sistem pendidikan (sekolah) dengan kata lain yang dilaksanakan oleh masyarakat umum. Dengan kata lain cara pendidikan yang diterima baik di lingkungan keluarga dan masyarakat luas (Purwanto dalam Pasaribu, 2017). Sedangkan menurut J. Benter (1967) bentuk pendidikan politik terbagi atas dua yakni laten dan manifest (nyata). Menurutny *“Political socialization is manifest when political feelings, values, beliefs, transmitted explicitly. This connotes the idea of the intentional teaching values, beliefs, etc. The process is latent when the cognitions, beliefs, implicitly derived from other social systems - i.e., family .”*

E. Tujuan Pendidikan Politik

Sebagaimana disinggung sebelumnya bahwa pendidikan politik adalah upaya untuk membentuk sikap dan karakter warganegara yang konstruktif terhadap sistem politik. J. Bender (1967) mengatakan muara dari pendidikan politik adalah perubahan politik (*political change*). Menurut Gerald *“There are at least two levels of political change: systemic and non-(or intra-) systemic change. The former refers to a change in the distribution and exercise of authority. The two ideal extremes would of course be pure democracy and pure totalitarianism with gradations between.”* Secara lebih luas Kartono (1989) dalam Handoyo dan Lestari (2017) merinci tujuan dari pendidikan politik yakni: (a) Membuat rakyat (individu, klien, anak didik, dan warga/masyarakat) mampu memahami situasi sosial politik yang penuh konflik, berani memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang tidak mantap; aktivitasnya diarahkan pada proses demokrasi sejati; (b) sanggup memperjuangkan kepentingan serta ideologi tertentu, khususnya yang berkorelasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama dan memperhatikan peranan insani dari setiap individu sebagai warganegara, mengembangkan semua bakat dan kemampuannya (pengetahuan, wawasan, sikap, keterampilan dan lain-lain), agar ia dapat aktif berpartisipasi dalam proses politik demi pembangunan bangsa dan negara.

Dari hal ini bisa dipahami bahwa pendidikan politik berupaya untuk menciptakan warga negara yang ideal bagi negara atau sistem politik. Negara baik mensyaratkan warga negara yang baik. Disinilah pendidikan politik berupaya menjembatani dan menciptakan warga negara yang baik tersebut.

METODE PELAKSANAAN

PKM ini dilaksanakan di SMK Neg. 5 Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun yang menjadi sasaran dari kegiatan PKM ini adalah siswa/siswi kelas XII SMK Neg. 5 Kabupaten Bulukumba. Sosialisasi Pendidikan Politik ini sangat penting dilaksanakan karena siswa/siswi kelas XII telah wajib pilih pada pemilihan umum tahun 2024 nantinya. PKM ini dilaksanakan oleh beberapa dosen Program Studi Administrasi Publik Universitas Pejuang RI Makassar.

Adapun materi-materi yang disampaikan pada kegiatan ini adalah

1. Pengertian Pemilihan Umum
2. Tujuan Pemilihan Umum
3. Elemen Pemilu
4. Prinsip Penyelenggara Pemilihan Umum
5. Peran Pemilih Pemula dalam menghadapi Isu-isu dan tantangan Pemilihan Umum

Adapun metode penyampaian materi yakni dengan memaparkan langsung kepada siswa/siswi peserta PKM, susunan kegiatan PKM adalah :

1. Uji kemampuan dan pemahaman dasar siswa/siswa tentang pemilihan umum
2. Pemberian Materi Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula
3. Diskusi dan Tanya Jawab
4. Memberikan Post Test dan Penutup

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun susunan kegiatan yang telah dilaksanakan yakni

1. Uji kemampuan dan pemahaman dasar siswa/siswa tentang pemilihan umum

Agar mendapat gambaran tentang pemahaman dasar siswa/siswa tentang pemilihan umum, terlebih dahulu siswa/siswi diberi lembaran soal tentang pemilihan umum. Siswa/siswi diberikan waktu sekitar 15 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Setelah selesai siswa/siswi mengumpulkan hasil jawaban mereka. Kemudian akan diberikan kesempatan kepada 3 orang siswa untuk menyampaikan pemahaman mereka tentang pemilihan umum. Siswa-siswa yang tidak sempat menyampaikan pemahaman mereka terkait pemilihan umum akan dilihat melalui hasil jawaban dari lembaran soal yang diberikan sebelumnya.

Setelah melihat jawaban-jawaban dari siswa/siswi, dapat disimpulkan jika pemahaman dasar mereka tentang pemilu bervariasi, ada yang menjawab pemilu merupakan kegiatan memilih pemimpin seperti presiden, gubernur dan bupati. Ada yang mengatakan bahwa pemilu merupakan cara orang untuk mendapatkan kekuasaan. Ada juga yang menjawab suatu kegiatan untuk memilih anggota DPR dan DPRD.

2. Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula

Setelah uji kemampuan dan pemahaman dasar siswa/siswi tentang pemilihan umum, maka dilanjutkan dengan memberikan materi tentang pendidikan politik bagi pemilih pemula. Sebagai pelaksana PKM, narasumber menyampaikan jika peran pemuda khususnya pemilih pemula sangat penting untuk berpartisipasi dalam proses pemilu. Hal ini karena pemilu akan melahirkan pemimpin yang berkualitas jika para pemilih paham dan mengetahui bagaimana memilih pemimpin yang betul-betul mempunyai kemampuan untuk memberikan perubahan ke arah yang lebih baik.

Pemilih pemula harus menjadi pemilih yang rasional, dan juga mengawasi kegiatan-kegiatan pemilihan umum. Terlebih saat ini ada banyak tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan pemilihan umum seperti politik uang, isu sara, berita hoaks dan lain-lain. Pemilih pemula harus cerdas dalam mengambil langkah dan keputusan ketika berkontribusi dalam pemilihan umum.

Rakyat berharap dengan pemilu maka akan ada perubahan, olehnya itu dalam proses pemilihan pemimpin harus dengan sistem yang lebih baik. Dalam pelaksanaan pemilu akan ada pemilih pemula yang baru pertama kali ikut atau memiliki hak mereka dalam pelaksanaan pemilihan umum. Namun masih banyak pemilih pemula yang belum menyadari pentingnya partisipasi mereka dalam pemilu. Masih banyak pemilih pemula yang asal ikut menggunakan hak pilihnya tanpa dasar dan pengetahuan tentang ilmu politik. Beberapa pemilih pemula juga hanya mengikuti arahan orang tua mereka baik itu saat pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden. Para pemilih pemula juga cenderung

terpengaruh oleh isu-isu politik di media sosial, begitu juga dengan berita-berita hoaks yang sering muncul menjelang pemilihan umum.

Dengan banyaknya tantangan tersebut tidak boleh mengurangi kualitas pengawasan pelaksanaan pemilu. Jangan sampai segala tantangan tersebut menyurutkan semangat untuk melaksanakan tugas pengawasan bagi penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Strategi pencegahan lebih diutamakan dalam proses pengawasan. Disamping itu diupayakan peningkatan pengawasan partisipatif yang melibatkan seluruh masyarakat sangat diperlukan. Masyarakat harus sadar, pemilihan umum yang berintegritas, dari proses sampai hasilnya, akan menghasilkan wakil rakyat yang amanah. Wakil rakyat yang amanah akan berpengaruh terhadap kelangsungan penyelenggaraan negara dan masyarakat. Untuk itu jangan sampai proses pemilu diwarnai pelanggaran yang dapat mengurangi integritas pelaksanaan pemilu.

Olehnya itu kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pemilih pemula tentang hak dan kewajiban politik mereka. Suara pemilih pemula sangatlah berpengaruh bagi kemajuan demokrasi Indonesia. Olehnya itu pemilih pemula harus memiliki kesadaran agar memanfaatkan hak memilih mereka. Karena merekalah generasi penerus bangsa ini, merekalah yang akan melanjutkan cita-cita bangsa ini

Pemilih pemula harus mempunyai dasar tentang ilmu politik. Apalagi di era digital sekarang ini, akan sangat mudah mendapatkan informasi-informasi politik, visi-misi dan program-program peserta pemilu. Olehnya itu dalam menentukan pilihan politiknya, pemilih pemula harus mengetahui biografi calon serta partai politik, pemilih pemula seharusnya bisa memilih pemimpin yang betul-betul dapat memberikan perubahan bukan hanya sebatas janji-janji politik. Dengan adanya pengetahuan dasar pemilih pemula tentang politik maka akan memberikan harapan perubahan bangsa ini kearah yang lebih baik.

3. Diskusi dan Tanya Jawab

Setelah Pemaparan Materi dilakukan, para siswa/siswi diberikan kesempatan untuk bertanya terkait hal-hal yang belum mereka mengerti. Para siswa/siswi sangat antusias memberikan pertanyaan dan berdiskusi tentang materi yang diberikan. Salah satu hal yang membuat siswa/siswi antusias karena tahun 2024, mereka akan memberikan hak pilihnya di pemilihan umum untuk pertama kalinya. Mereka sangat tertarik berdiskusi tentang karakter calon pemimpin yang bisa membuat bangsa ini lebih maju dan berkembang. Dengan adanya semangat dan antusias dari siswa/siswi menandakan bahwa ada peningkatan dalam diri mereka tentang pentingnya memahami ilmu politik dan berperan serta dalam pemilihan umum.

4. Memberikan Post Test dan Penutup

Setelah diskusi dan tanya jawab selesai. Para siswa/siswi diberikan lembaran pertanyaan terkait materi-materi yang telah diberikan. Beberapa siswa memberikan jawaban langsung tentang pertanyaan yang telah diberikan. Berdasarkan hasil post test disimpulkan jika ada peningkatan pemahaman siswa/siswi SMK Neg. 5 Kabupaten Bulukumba tentang materi-materi yang telah diberikan. Kegiatan PKM pun ditutup dengan memberikan kesimpulan materi dan diskusi. Para siswa/siswi juga diberikan modul tentang materi yang telah disampaikan. Siswa/siswi juga masih bisa menghubungi pemateri jika masih ada hal yang perlu ditanyakan dan didiskusikan.

KESIMPULAN

Pendidikan politik sangatlah penting diberikan kepada Pemilih Pemula. Hal ini karena pemahaman politik mereka masih terbatas. Dengan adanya pendidikan politik maka akan meningkatkan pengetahuan pemilih pemula sehingga mereka dapat berpartisipasi maksimal dalam sistem politik khususnya dalam proses pemilihan umum. Pendidikan Politik yang diberikan akan menyadarkan pemilih pemula tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam memahami situasi sosial politik. Para pemilih pemula juga akan berpikir kritis dalam mempertahankan ideologi bangsa ini. Pelaksanaan kegiatan PKM di SMK Neg. 5 Kabupaten Bulukumba, disimpulkan bahwa adanya peningkatan pemahaman dari siswa/siswi tentang materi-materi yang diberikan yakni konsep pemilihan umum, elemen pemilu, prinsip penyelenggara pemilihan umum dan bagaimana peran pemilih pemula dalam menghadapi isu-isu dan tantangan pemilihan umum.

TINJAUAN PUSTAKA

- [1] Alfiantoro, Handoko. 2018. "Posisi Hukum Tindak Pidana Korupsi Politik Sebagai Bagian Dari Refleksi Praktik Politik Uang." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*.
- [2] Akhmad, Z., Hasran, H., & Rahman, R. (2022). Pengaruh Kepemimpinan dalam Peningkatan Motivasi Kerja PNS di Kantor Kecamatan. *Journal of Government Insight*, 2(2), 182–197. Retrieved from <https://jurnal-umsi.ac.id/index.php/jgi/article/view/472>
- [3] Budiarjo, Minam. 2008. *Partisipasi Politik dan Partai Politik*. Jakarta: Gremedia
- [4] Choslisin 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press
- [5] Chrisdanty, Febry, and Diah Wahyulina. 2014. "Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD DAN DPRD Di Wilayah Kabupaten/Kota." *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*.
- [6] Hamson, Z. (2021). Politik Uang di Pemilu Indonesia: Sebuah Tinjauan. *Journal of Communication Sciences*, 4(1), 36-44.
- [7] Akhmad, Z., & Rahman. (2022). IMPLEMENTASI ELEKTRONIK GOVERNMENT DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GOWA. *Jurnal Ilmiah Administrasita*, 13(1), 21–35. <https://doi.org/10.47030/administrasita.v13i1.376>
- [8] Hatta Abdi Muhammad1, Nopyandri2, Ujang Babas3. (2020). Sosialisasi Pendidikan Politik Untuk Siswa Sekolah Pinggiran Kota Jambi Dalam Menghadapi Pilkada Serentak Provinsi Jambi Tahun 2020. *Rambideun: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 19. <http://journal.umuslim.ac.id/index.php/pkm/article/view/77>
- [9] Huntington, Samuel P. 1991. "Democracy's Third Wave." *Journal of Democracy*.
- [10] Irma, P., & Fajriyah, N. (2021). Rendahnya Partisipasi Politik Pemula pada Pemilihan Umum. *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa*, 1(1).
- [11] Islah, K., Juardi, J., & Nasim, E. S. (2020). Sosialisasi Pemilu 2019 Untuk Pemilih Pemula Kota Depok. *Jurnal Komunitas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 46–50. <https://doi.org/10.31334/jks.v3i1.969>
- [12] J. A. Scholte, "Reinventing global democracy," *Eur. J. Int. Relations*, vol. 20, no. 1, hal. 3–28, 2014, doi: 10.1177/1354066111436237.
- [13] J. Maaratong, "FUNGSI PARTAI POLITIK SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI POLITIK (Suatu Studi pada Partai Demokrasi Indonesia

- Perjuangan di Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud),” *J. UNSRAT*, 2020.
- [14] Muhtadi, Burhanuddin. 2013. “Politik Uang Dan Dinamika Elektoral Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara Party-Id Dan Patron-Klien.” *Jurnal Penelitian Politik*.
- [15] Nur Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>
- [16] Sa’ban, L. . A., Nastia, N., Wijaya, A. A. M., & Lawelai, H. (2021). Mengawal Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Di Kota Baubau. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*, 5(1), 226. <https://doi.org/10.31604/jim.v5i1.2021.226-234>
- [17] Suhartono, E. (2019). Rendahnya Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil. *Jurnal Antropologi Sumatera*, 17(1), 12-29.
- [18] Susanto, Is. 2018. “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Money Politics Pada Pemilu.” *Istinbath : Jurnal Hukum*.
- [19] Valentina, T. R. (2009). Peluang Demokrasi dan Peta Perilaku Pemilih terhadap Partai Politik untuk Pemilu 2009 di Yogyakarta. *Jurnal Demokrasi*, 8(2), 167-186.